

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, A. U., Lazuardi, S. & Putri, D. C., 2020. Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-undang. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14(No. 1), pp. 1-18.
- Cahyadi, A., 2003. E-Government Suatu Tinjauan Konsep dan Permasalahan. *The Winners*, Vol. 4(No. 1), pp. 1-12.
- CNN Indonesia, 2022. 733.957 Nomor Induk Berusaha Terbit Hingga 31 Januari 2022. [Online] Available at: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220131191109-92-753535/733957-nomor-induk-berusaha-terbit-hingga-31-januari-2022> [Diakses 11 Juli 2023].
- Darmawan, C., 1999. Citra Birokrasi dan Upaya Pemberdayaannya. *Jurnal Mimbar Pendidikan*, Vol. 18(No. 2), pp. 38-47.
- Dunn, W. N., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. 2 penyunt. Yogyakarta: UGM Press.
- Faedlulloh, D., Maarif, S., Meutia, I. F. & Yulianti, D., 2020. Birokrasi dan Revolusi Industri 4.0 Mencegah Smart ASN Menjadi Mitos dalam Agenda Reformasi Birokrasi Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 16(No. 3), pp. 313-336.
- Jaweng, R. E. et al., 2019. *Evaluasi Setahun OSS*, Jakarta: KPPOD.
- KemenPANRB, 2019. *Mengawal Reformasi Birokrasi dengan Teknologi Informasi*. [Online] Available at: <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/mengawal-reformasi-birokrasi-dengan-teknologi-informasi> [Diakses 16 Februari 2022].
- Mustapa, Z., 2011. Reformasi Birokrasi Melalui E-GOVERNANCE Peluang atau Tantangan dalam Pelayanan Publik ?. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1(No. 2), pp. 146-155.
- Nashrullah, N., 2021. *Ombudsman Soroti Perizinan Usaha Berbasis Tingkat Risiko*. [Online] Available at: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/qzymhc320/ombudsman-soroti-perizinan-usaha-berbasis-tingkat-risiko> [Diakses 11 Juli 2023].
- Nugroho, Y. A., 2018. *Pendekatan Pelayanan Publik*. [Online] Available at: <https://kkp.go.id/bdasukamandi/artikel/4423-pendekatan-pelayanan-publik> [Diakses 7 Februari 2023].

- Ohoitimur, J., 2018. Disrupsi Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi. *Respons Jurnal Etika Sosial*, Vol. 23(No. 2), pp. 143-166.
- Papadopoulos, Y., 2004. *Network Governance: Governance Without Parties*, Granada: ECPR.
- Permana, Y. & Pradipto, R., 2020. *Perizinan Berbasis Risiko Kerancuan Berfikir Omnibus Law Cipta Kerja*. [Online] Available at: https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/966/2020/07/Rimawan-P_-Risk-Based-Approach-NA-OL.pdf [Diakses 11 Juli 2024].
- Putera, R. E., 2009. E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*, Vol. 8(No. 1).
- Qurani, H., 2018. *Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus Direvisi*. [Online] Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-tabrak-aturan-sana-sini--pp-oss-harus-direvisi-lt5bcc0df105bb5/?page=all> [Diakses 11 Juli 2023].
- Riyadi, S., 2006. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya*, Vol. 4(No. 1).
- Rozy, F. & Zoeltom, A., 2007. Ada TI, Ada Reformasi Birokrasi. *Majalah e-Indonesia*, Juni. Vol. 3(No. 20).
- Rusfiana, Y. & Supriatna, C., 2021. *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Samin, R., 2011. REFORMASI BIROKRASI. *Jurnal FISIP UMRAH*, Vol. 2(No. 2), pp. 172 - 182.
- Sarosa, S., 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Schwab, K., 2019. *Revolusi Industri Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sholihah, L. & Mulianingsih, S., 2023. Reformasi Birokrasi. *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 5(No. 1), pp. 41-58.
- Sinambela, L. P., 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sirajudin & Winardi, 2015. *Dasar-dasar hukum tata negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Suhayati, M., 2018. Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. *Jurnal Info Singkat*, Vol. 10(No. 23).

- SumbawaKab, 2017. *Tingkatkan Daya Saing, Pemkab Sumbawa Jalin Kerjasama Dengan Pemkot Bandung*. [Online]
Available at: <http://sumbawakab.go.id/read/4430/tingkatkan-daya-saing-pemkab-sumbawa-jalin-kerjasama--dengan-pemkot-bandung.html>
[Diakses 10 10 2019].
- SumbawaKab, t.thn. *Sejarah Kabupaten Sumbawa*. [Online]
Available at: <https://sumbawakab.go.id/sejarah-kab.-sumbawa.html>
[Diakses 10 Juli 2024].
- Suseno, P., t.thn. *Konsep Dasar Manajemen Risiko*. [Online]
Available at: <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4401-M1.pdf>
[Diakses 10 Juli 2024].
- Sutedi, A., 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarigan, A., 2015. *Dilema Birokrasi Satu Pintu*. [Online]
Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/08/19033681/Dilema.Birokrasi.Satu.Pintu>
[Diakses 14 Februari 2023].
- Thoha, M., 2008. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Thoha, M., 2014. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Thoha, M., 2016. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyudin, Y., 2024. *Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2024*. 16 penyunt. Sumbawa: BPS Sumbawa.
- Wahyudiyanto, D., 2022. *Manajemen Risiko Implementasi Pada Perguruan Tinggi*. [Online]
Available at: <https://spm.unj.ac.id/wp-content/uploads/2022/05/Materi-RM-UNJ-rev.pdf>
[Diakses 10 Juli 2024].
- Wardana, D. & Meiwanda, G., 2017. Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih, Dan Bermartabat. *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, Vol. 3(No. 1), pp. 331-336.
- Wastiono, S., 2002. *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan*. Bandung: Citra Pindo.
- Wastuhana, Y. & Werdiningsih, R., 2021. Reformasi Birokrasi Era Informasi Teknologi. *Jurnal Media Administrasi*, Vol. 3(No. 1), pp. 8-15.

Widjiastuti, A., 2015. Birokrasi Pemerintahan Negara Sebagai Pemegang Peran Vital yang Sangat Strategis dan Vital dalam Menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 4(No. 1), p. 37.

Dokumen Perundang-undangan

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Perka Bkpm Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Indonesia 2010-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Menteri PANRB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa

Peraturan Bupati Sumbawa No. 91 Tahun 2018 tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2023

Peraturan Bupati Sumbawa No. 77 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis DPMPTS Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026

Peraturan Bupati Sumbawa No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Website, Nama Domain Dan Sub Domain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Peraturan Bupati Sumbawa No. 28 Tahun 2017 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumbawa 2017-2022

Peraturan Bupati Sumbawa No. 1 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa